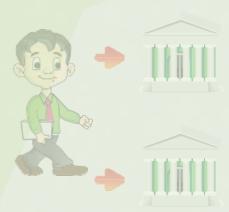


Penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui pengadilan, yang langkah-langkahnya digambarkan sebagai berikut:



Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.

Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara.

Pengajuan gugatan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Adjudikasi dari Komisi Informasi Pusat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.

Jika tidak menerima putusan pengadilan, penggugat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.



Pengajuan Kasasi dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri.



SELESAI

Jika pengaju sengketa puas atas putusan pengadilan, sengketa selesai



PPID DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU

SE

PENYELESAIAN SENGKETA INE

TaTa CaRa

PERMOHONAN

SENGKETA INFORmasI

INFORmasI PUBLIK &

DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU

Jalan : Basuki Rahmad No 4

Kota Bengkulu **T**: (0736) 23253

E : dinsosprovbkl@gmail.com

W: https://dinsos.bengkuluprov.go.id

PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK DINAS SOSIAL PROV. BENGKULU

PERMOHONANINFORMASI

LANGKAH 1

Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi publik kepada Kementerian Perindustrian melalui Pusat Komunikasi Publik sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik langsung maupun tidak langsung (surat, email, telepon).

LANGKAH 2

Pemohon Informasi Publik harus menyebutkan nama, alamat, subiek/ienis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.



Petugas Informasi Kementerian Perindustrian mencatat semua yang disebutkan oleh Pemohon Informasi Publik pada langkah 2.

LANGKAH 4

Pemohon Informasi Publik harus meminta tanda bukti kepada Petugas Informasi bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan.



LANGKAH 5

PPID memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Kementerian Perindustrian (Sekretaris Jenderal) berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut:



✓ SELESAI

Jika pengaju keberatan puas

atas putusan Atasan PPID,

maka sengketa keberatan

Jika pengaju keberatan Informasi Publik tidak puas atas tanggapan

Atasan PPID, maka penyelesaian

sengketa Informasi Publik dapat

diaiukan kepada Komisi Informasi

selesai.

Pusat.

LANGKAH 1

Keberatan diajukan kepada atasan PPID Kementerian Perindustrian dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan.



LANGKAH 2

Atasan PPID Kementerian Perindustrian harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan





tersebut.



Komisi Informasi,



Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat yang langkah-langkahnya digambarkan berikutini:



LANGKAH 1

Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID vang tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.





SELESAI

Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak

berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak

diri dari perundingan, maka Komisi Informasi

atau para pihak yang bersengketa menarik

LANGKAH 2

Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, paling lambat 100 (seratus) hari kerja.



Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menvatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka dapat pengadilan.





